

FANZINE

# aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Aktual.com | Edisi 17 April 2018



## TUMPAHAN MINYAK TELUK BALIKPAPAN **AKIBAT KELALAIAN PERTAMINA?**



Tumpahan minyak milik PT Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan tidak hanya berdampak buruk bagi sosial lingkungan, namun juga membawa kesedihan mendalam utamanya bagi keluarga dari lima orang yang menjadi korban jiwa dari peristiwa nahas itu. Akibat ceceran minyak di permukaan air Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, menyebabkan terjadinya kebakaran dua kapal kayu milik nelayan dan bagian belakang/buritan kapal Cargo Ever Judger berbendera Panama asal China yang bermuatan batu bara.

Kobaran api yang berlangsung Sabtu pagi sekitar pukul 10:00 WITA (31/3) itu dapat dipadamkan beberapa jam kemudian dengan melibatkan tim pemadam kebakaran dari Pertamina RU V, Chevron, Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dan BPBD Balikpapan, namun lima orang nelayan bernama Suyono (55), Sutoyo (42), Imam (41), Wahyu Gusti Anggoro (27) dan Agus Salim (43) menjadi bagian dari korban.

Kala itu, belum diketahui sumber ceceran minyak berasal dari mana. Berdasarkan hasil uji laboratorium Pertamina dikatakan bahwa ceceran minyak yang ditemukan berjenis



Jalur pipa minyak Pertamina dari terminal Lawe-Lawe ke kilang Balikpapan.

fuel oil (bahan bakar kapal) dimana Kilang Pertamina Balikpapan tidak memproduksi jenis minyak tersebut. Dengan demikian Pertamina menepis sangkaan kelalaian dari aktifitas korporasi. Bahkan Pertamina juga menyampaikan hasil pemeriksaan instalasi pipa bawah laut yang menyalur minyak mentah dari terminal Lawe-Lawe ke kilang Balikpapan, tidak ditemukan kebocoran dan lokasi pipa berada jauh dari titik kebakaran.

Beberapa hari kemudian atau tepatnya pada Senin sore (2/4) perusahan plat merah itu baru menyadari adanya indikasi patahan pipa dan dilanjutkan sight sonar scan pada Selasa pagi (3/4). Sorenya, Pertamina telah menemukan hasil dan mengakui bahwa sumber ceceran minyak berasal dari pipa bawa laut yang menghubungkan terminal

Lawe-Lawe ke fasilitas Refinery (kilang).

Pipa berdiameter 20 inchi dengan ketebalan 12 milimeteryang terbuat dari bahan baja tersebut mengalami patah dan bergeser sejauh 100 meter dari posisi semula. Menurut keterangan General Manager Pertamina RU V Balikpapan, Togar MP Manurung, patahnya pipa bukan karena operasional Pertamina melainkan ada unsur *eksternal force* yang terjadi pada pipa di kedalaman 22 sampai dengan 26 meter.

### Safety Industri Migas Dipertanyakan

Bicara industri migas tentunya yang terbayang adalah kompleksitas proyek, kecanggihan teknologi dan tentunya out put produk yang mudah terbakar. Tingginya risiko yang dihadapi menuntut industri ini

menerapkan standar keamanan yang juga tinggi. Tentu persoalan ini telah menjadi perhatian bagi pemerintah, melalui Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas telah dicantumkan satandard keamanan yang berangkat dari tolok ukur dampak terhadap sumber daya dan lingkungan, efektifitas serta mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Melihat enam tahun belakangan (2012–2017), statistik kecelakaan kerja terbilang cukup tinggi terjadi pada tahun 2015 dengan kecelakaan ringan sebanyak 206, 55 sedang, 10 berat dan 2 fatal. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat sebanyak 55 kecelakaan ringan, 20 sedang, 7 berat dan 4 fatal.

Namun, terkait ceceran minyak di Balikpapan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menilai instalasi pipa bawah laut masih layak operasi.

“Pipa crude dengan ketebalan 20 inch yang putus [karena] terkena jangkar kapal di Teluk Balikpapan telah sesuai dengan standar ASME/ANSI B 31.4 dan spesifikasi teknis, sehingga dalam keadaan layak operasi saat kejadian,” terang Arcandra.

Sebagai informasi, pipa Pertamina yang putus memiliki ukuran 20 inch dengan ketebalan pipa 11,9 mm sepanjang 3.600 m dan terbuat dari bahan carbon steel pipe API 5L Grade X42. Kekuatan pipa terhadap tekanan diukur dari maximum allowable operating pressure (MAOP) adalah 1.061,42 psig, sementara operating pressure yang terjadi pada pipa masih di bawah yakni hanya mencapai 170,67 psig.

Arcandra menambahkan bahwa tempat lokasi putusnya pipa juga telah ditetapkan menjadi daerah Obyek Vital Nasional (Obvitnas) untuk melindungi instalasi, kapal kapal, dan atau alat-alat lain terhadap gangguan pihak luar. dan menurut PP 17 Tahun 1974, di dalam daerah terlarang ini semua orang, kapal dan lain-lain sejenisnya dilarang memasukinya.

“Instalasi Kilang RU V termasuk pipa penyalur minyak diameter 20 inch telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas), dan semua orang dan sejenisnya (kapal) dilarang melewatkannya”, Jelas Arcandra dalam Raker DPR Komisi VII yang juga dihadiri dari Kementerian LHK, Dirjen Perhubungan Laut, Bareskrim POLRI dan pihak lainnya.

Arcandra menegaskan bahwa daerah putusnya pipa di Teluk Balikpapan telah ditetapkan sebagai Daerah terbatas Terlarang (DTT) sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 1973 yang melarang baik kapal atau sejenisnya membuang/membongkar jangkar.

“Pipa penyalur minyak diameter 20 inch telah ditetapkan Daerah Terbatas Terlarang (DTT) dan dilarang membuang sauh [jangkar],” jelasnya.

### Pertamina Lalai?

Terkait kasus ceceran minyak di Balikpapan, DPR menilai ada unsur kelalaian oleh Pertamina dan tidak sesuai dengan standar kemanan yang harusnya dimiliki industri migas. Wakil Ketua Komisi VII, Herman Khaeron menuturkan ceceran minyak di perairan Teluk Balikpapan telah

ANTARA FOTO/Sherlyam



Dua kapal tugboat memadamkan sisa api yang masih membakar dek kapal kargo MV Ever Judger di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (31/3).

ditemukan sejak pukul 03:00. Artinya terdapat rentang waktu sekitar 7 jam hingga terjadinya insiden kebakaran yang merenggut korban jiwa pada pukul 10:00 Sabtu (31/3). Menurut Herman, harusnya rentang waktu 7 jam itu telah diidentifikasi dan dilakukan upaya lokalisir serta proteksi ceceran minyak dari aktifitas masyarakat. Sehingga kebakaran kapal bisa diantisipasi. Namun faktanya hingga terjadi kebakaran, Pertamina masih belum menyadari bahwa sumber minyak berasal dari patahan pipa, bahkan pertamina mengetahui bahwa pipa transmisi itu patah setelah dua hari berikutnya.

“Jam 03:00 sudah ada tumpahan miyak di Balikpapan yang belum diketahui darimana bocornya. Yang disesalkan, terjadi kebakaran jam 10 pagi, ada selisih 7 jam sebelumnya yang bisa dijadikan sarana untuk melakukan

proteksi area dan sebagainya sesuai emergency respon prosedur. Kejadian terbakar yang menelan korban berselang 7 jam setelah oil spills itu berlangsung, padahal 7 jam itu waktu yang sangat panjang bisa mengerahkan berbagai potensi untuk memproteksi

area yang tertumpah. Jadi menurut saya ada unsur kelalaian. Bahkan setelah 2 hari, baru Pertamina mengumumkan kalau itu dari pipa yang membentang dari Lawe-Lawe ke Penajam Paser Utara, masuk di Teluk Balikpapan dan masuk di kawasan Prosesing,” kata Heman.

Disisi lain, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Balikpapan Sanggam Marihot menceritakan Kapal Ever judger tiba di Balikpapan hari Kamis tanggal 29 maret pukul 2 WITA dini hari. Kemudian bersandar di dermaga PT Dermaga Perkasa Pratama pukul 5:55. Memuat batubara pukul 6:35 sampai 12:20. Muatan sejumlah 74.808 metric ton.

Kemudian, lanjutnya, agen kapal PT Inascop Maritim Indonesia cabang Balikpapan melakukan surat izin berlayar pada hari jumat 30 maret. Surat izin berlayar diterbitkan KSOP kelas 1 Balikpapan pada hari jumat 30 maret pukul 12:47.

Pada Jumat 30 maret pandu naik diatas kapal untuk on board sekitar pukul 20:30. Kapal berangkat dari dermaga PT Perkasa pada pukul 21:08. Kemudian sambil menunggu air pasang, kapal Ever Judger dengan jangkar yang ada di sekelilingnya berjarak 4 kabel dengan tanda pipa kurang lebih 3 kabel.

"Dalam hal ini diperkirakan jangkar melorot. Tapi kami serahkan ke ranah hukum pihak Polda. Ada miskominikasi antara Nakhoda kapal dengan penjaga jangkar. Kapal itu bukan lego jangkar di sana, posisi kapal berlayar tapi jangkar melorot," jelasnya.

Pada Sabtu (31/4) sekitar pukul sekitar pukul 04.00, telah terjadi tumpahan minyak dan sumbernya belum diketahui.

Berdasarkan saksi sopir motor speedboard, Perwakilan Polda Kaltim menyatakan bahwa tumpahan minyak telah terjadi pada sabtu 03:00. Saat itu, Speedboard yang

bersangkutan sedang melewati di perairan tersebut. Kemudian, pada pukul 10:30 terjadi kebakaran di teluk Balikpapan akibat minyak mentah.

### Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR

Pada tanggal 8-10 April sebanyak 18 anggota DPR Komisi VII melakukan kunjungan spesifik terkait tumpahan minyak yang telah mengakibatkan banyak kerugian baik materil maupun nonmateril. Dalam agenda ini, rombongan anggota dewan merasa tidak puas dan kecewa karena dari pihak Pertamina hanya diwakili oleh Direktur Pengolahan. Sementara ekspektasi rombongan berharap kehadiran Dirut Pertamina, Elia Massa Manik agar dapat mengambil kebijakan strategis atas berbagai persoalan yang ada.

Selanjutnya dari laporan hasil kunjungan komisi VII DPR yang telah melakukan pendalaman dengan berbagai pihak, diketahui bahwa Polda Kalimantan Timur telah memanggil sebanyak 26 saksi yakni 2 orang Polisi Airud yang datang ke lokasi TKP, 4 orang keluarga korban, 1 orang kapten kapal (Panascope maritime Indonesia, MV Ever Jadger) 1 orang dari pihak KSOP, 4 orang Pelindo yang bertugas



dpr.go.id

**Wakil Ketua Komisi VII,  
Herman Khaeron saat  
mengunjungi lokasi tumpahan  
minyak di Teluk balikpapan.**

memandu kapal yang masuk ke Teluk Balikpapan, kapten kapal Mualim 3, 9 orang karyawan Pertamina dan dari KLHK. Aparat pencegah hukum membagi kasus ini menjadi dua yaitu kasus pencemaran baku mutu air laut dan kasus terputusnya pipa Pertamina. Sedangkan tindak lanjut dari kunjungan kerja ini dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di komisi VII DPR pada Selasa sore (10/4).

### Dirut Mangkir, RDP Batal

DPR lagi-lagi dikecewakan dengan ketidakhadiran Direktur Utama Pertamina, Elia Massa Manik pada RDP. Berdasarkan penjelasan Direktur Keuangan Pertamina yang mewakili pada RDP tersebut, Dirut berhalangan karena menghadiri forum Asia-Afrika di Bali.

“Dirut berhalangan karena menghadiri Asia-Afrika Forum yang memang hari ini sudah dijadwal lama oleh pemerintah antara Indonesia dengan 46 negara Asia-Afrika, yang mana disana juga ada beberapa aset Pertamina,” jelas Arief Budiman.

Akibat daripada itu, DPR membatalkan rapat dan menaikan tingkat pembahasan pada rapat kerja dengan menghadirkan Menteri terkait. Menurut Herman Khaeron selaku pimpinan rapat, jika pun pertemuan itu dilanjukan, tidak akan ada hasil apapun, sehubung yang merepresentasikan Pertamina tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan strategis mengenai kesepakatan penyelesaian masalah termasuk besaran ganti rugi terhadap korban.

“Kemarin di Balikpapan ada keinginan dari anggota dewan, terkait ganti rugi agar



**Direktur Keuangan Pertamina, Arief Budiman.**

diputusakan di Balikpapan. Pak Toharso (Direktur Pengolahan) tidak sanggup memutuskan sendiri. Apakah sudah ada keputusan dari Pertamina untuk yang wafat? kalau belum ada keputusan, buat apa rapat hari ini. Kami tidak ingin penyelesaian masalah ini menunggu hasil Polda Kaltim siapa yang meyebabkan ini terjadi. Karena kalau menunggu itu, masyarakat semakin ditelantarkan dengan ketidakpastian. Jadi kami agendakan Raker Senin (16/4).” Jelasnya.

Adapun komisi VII DPR mencatat beberapa persoalan yang belum terungkap akibat tumpahan minyak yakni 10 set jaring ikan, 600 bubu milik KUB Sumber Bahagia dan KUB Semangat Baru di Kariagau, dan sebanyak 45 kapal serta 181 nelayan yang tidak bisa melaut selama 3 hari akibat ceceran minyak.

### KLHK Akan Tuntut Ganti Rugi

Sementara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertindak



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) bersama Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar (kanan) mengikuti rapat kerja terkait upaya penanganan tumpahan minyak Teluk Balikpapan bersama Pertamina dan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

sigap merespon insiden kebakaran dan tumpahan minyak ini. Pada hari yang sama, KLHK langsung menerjunkan tim ke lapangan. Menurut laporan KLHK, selain terdapat 5 orang korban jiwa, diidentifikasi area terdampak sekitar 7.000 ha dengan panjang pantai terdampak di kota Balikpapan dan kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 60 km.

Kemudian dampak terhadap ekosistem berupa tanaman mangrove seluas 34 ha yang terbagi di Kelurahan Kariangau sebanyak 6.000 tanaman, di kampung Atas Air Magasari 2.000 bibit, dan ditemukan juga biota laut jenis kepiting mengalami kematian akibat pencemaran minyak. Tak kalah penting, masyarakat juga mengeluh mual dan pusing akibat bau minyak yang menyengat, karenanya KLHK akan menuntut ganti rugi ke Pertamina.

“Bisa dikenakan sangsi administratif, pidana maupun perdata. Kami sedang

mendalami hal itu. Kami sedang melakukan investigasi dan

menerjunkan tim sekitar 40 orang dari penyelam profesional, ahli dan sebagainya. Nanti kita bawa ke lab kami tanggal 31 Maret itu sudah di lapangan,” kata Direktur Jendral Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani.

Dalam Raker DPR-Pertamina yang digelar Senin (16/4), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa dalam pengawasan lingkungan hidup terkait ceceran minyak balikpapan, pihaknya menemukan dokumen lingkungan tidak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pada pipa.

“Dokumen lingkungan juga tidak mencantumkan kajian perawatan pipa. Inspeksi pipa tidak memadai hanya untuk kepentingan sertifikasi. Tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis dan tidak memiliki sitem peringatan dini,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, KLHK akan menempuh beberapa hal, pertama akan menerbitkan sanksi administrasi kepada

pertamina RU 5 untuk melakukan kajian resiko lingkungan dan audit lingkungan wajib dengan fokus pada keamanan pipa, penyalur minyak, kilang minyak dan sarana pendukung. Pertamina RU 5 juga harus melanjutkan penanggulangan tumpahan minyak dan pemulihhan lingkungan.

KLHK, lanjutnya, juga sedang mempersiapkan proses penegakan hukum lingkungan hidup: melanjutkan pengawasan, penyelidikan tidak pidana yang akan dikordinasikan dengan polda Kaltim. Termasuk dalam hal kaitan perdata yang menjadi tanggungjawab ganti rugi oleh Pertamina.

### Pertamina Meneror Korban?

Terkait kepastian besaran kompensasi kepada para pihak korban, Pertamina masih menunggu hasil investigasi kepolisian atas penyebab putusnya pipa yang sementara diduga disebabkan jangkar kapal Ever Judger. Namun daripada itu, Pertamina mengaku telah memberikan uang duka kepada keluarga korban jiwa, kemudian disiapkan beasiswa sekolah, dan bagi tulang punggung keluarga, diberi peluang untuk menjadi pekerja mitra Pertamina.

Anggota DPR Komisi VII lainnya, Adian Napitupulu merasa Pertamina kurang memiliki rasa empatik dan responsif kepada masyarakat yang menjadi korban, hingga lebih dari 10 hari sejak



Region Manager Communication &  
CSR Kalimantan, Yudy Nugraha

kejadian, Dirut Pertamina belum mengunjungi masyarakat terdampak terkhusus keluarga korban jiwa dari peristiwa kebakaran kapal. Didapati uang santunan Pertamina kepada keluarga korban hanya sebesar Rp2,5 juta. Dan yang mengesalkan bagi Adian, terdapat intervensi pihak Pertamina kepada masyarakat.

“Ada yang namanya Yudi bagian CSR, omongannya seperti ini (Ibu mau nuntut bagaimanapun tidak akan menang, Ibu mau menggugat kemanapun tidak akan menang karena dibelakang kami ada banyak menteri-menteri) itu luarbiasa. Menyampaikan kalimat seperti itu dihadapan korban, itu luarbiasa

jahat. Kalian tidak memberikan ganti yang layak dan merendahkan korban dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Jangan karena mereka nelayan, bisa kalian semena-mena. Jangan merusak pemerintahan dan bawa-bawa menteri karena belum tentu menterinya menyetujui itu. Saya bilang Pertamina sangat sombong,” tutur Adian.

Tidak berhenti di situ, Adian menyerukan agar peristiwa kebocoran minyak ini menjadi pengembangan beberapa kasus sebelumnya yang disinyalir ada tindak penyimpangan terhadap pengelolaan minyak di Balikpapan.

“Kalau kita buka data, tahun 2005 dulu ada kapal tanker ditangkap, dan hasil penyidikan saat itu, minyak di kapal tanker ini

dari Lawe-Lawe, coba diperiksa. Kemudian beberapa hari setelah kejadian di laut itu juga ada kebocoran pipa di Penajam. Artinya ada banyak peristiwa terkait dengan ini yang jangan-jangan terkait semua,” ujar dia.

Terkait tuduhan Adian Napitupulu, Region Manager Communication & CSR Kalimantan, Yudy Nugraha membantah hal tersebut. Pihaknya tidak pernah melakukan teror terhadap korban ceceran minyak Balikpapan seperti yang disampaikan Adian.

“Sebagai CSR yang telah bekerja lebih dari tujuh tahun, tidak mungkin saya berbicara seperti itu. Jelas sekali itu melanggar kode etik yang ada,” jelasnya.

Dari struktur kalimat yang disampaikan, lanjutnya, jelas sekali itu bukan tipe dan sifat kesehariannya. Dirinya meyakinkan bahwa ketika bertugas, selalu bersama dengan saksi lain.

“Dalam pergi bertugas, saya selalu ada saksi. Silahkan tanya saksi atau Ibu yang dimaksud,” jelasnya.

Terkait santunan korban, dalam rapat kerja DPR dan Pertamina yang digelar Senin (17/4), Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan referensi yang dipakai untuk santunan korban meninggal yaitu Permen bantuan asuransi Kementerian KKP.

“Kalau meninggal dunia di laut Rp200 juta. Sedangkan Permen Kelautan, meninggal dunia akibat Kecelakaan kerja Rp150 juta,” jelasnya.

Elia Massa Manik mengungkapkan untuk santunan korban meninggal dunia, pihaknya mengacu peraturan dengan memberikan santunan Rp200 juta. Diluar santunan itu,



Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik saat RDP dengan DPR RI.

Pertamina juga menyediakan paket sosial responsibility Rp200 juta, termasuk bantuan modal usaha produktif.

“Kami juga mengganti kapal nelayan yang terbakar serta mengakomodir keluarga korban untuk bekerja di lingkungan Pertamina. Dari keluarga Pak Sutoyo, dua orang anaknya mulai kita pekerjakan di lingkungan Pertamina. Sedangkan untuk ganti kapal sebesar Rp57,8 juta. Dari lima keluarga korban, empat keluarga sudah kita selesaikan, sisa satu keluarga yang masih dalam tahap komunikasi,” pungkasnya.

### Kritik Aktivis Lingkungan dan Pemerhati Migas

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, mengecam terjadinya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan yang memakan korban jiwa dan menyebabkan punahnya biota laut. Pradarma berharap agar disikapi dengan sigap dan menjadi evaluasi bagi Pertamina agar tidak terulang di kemudian hari.

“Pemerintah harus bertindak tegas supaya hal ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Kami mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan serta pihak terkait lainnya bergerak cepat untuk menangani persoalan ini, mengingat kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2004 dimana tumpahan minyak dari Perusahaan Total E & P Ind. yang membuat nelayan Balikpapan tidak dapat melaut dalam jangka waktu yang cukup panjang,” pungkas dia.

Begitupun Publish What You Pay (PWYP)



Twitter Sutopo - @Sutopo\_PN

Indonesia juga mendesak agar pihak berwenang menelusuri lebih lanjut penyebab dari tumpahan minyak tersebut. Koordinator Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, menegaskan bahwa peristiwa ini termasuk bentuk kecelakaan tingkat fatal di sektor migas.

Lebih lanjut, Maryati juga meminta agar hasil penyelidikan disampaikan terhadap publik, mengingat banyak pihak yang dirugikan akibat peristiwa ini. Selain itu, peristiwa tumpahan minyak ini menjadi momentum untuk mengevaluasi aktivitas di Teluk Balikpapan, sehubungan di jalur tersebut banyak aktivitas pengangkutan migas dan batubara.

“Sesuai dengan asas ‘polluter pays

principle' maka yang harus bertanggungjawab untuk melakukan penanggulangan, pemulihan, pembiayaan dan ganti rugi adalah pihak yang karena kegiatannya telah mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut, dalam hal ini adalah Pertamina dan pihak-pihak lain hasil penyelidikan nantinya. Tanggungjawab mutlak atas biaya tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut," kata dia.

Ketua Umum Gerakan Rakyat Kaltim Bersatu (GRKB) Wahdiat Alghazali menambahkan bahwa pencemaran teluk Balikpapan yang menelan korban jiwa tidak terlepas dari unsur kelalaian dan ketidakprofesionalan Pertamina.

"Patahnya pipa seharusnya dapat diantisipasi lebih dini oleh Kilang Pertamina UP V, jika saja Pertamina memiliki alat dan sistem deteksi dari setiap instalasinya. Bayangkan, masa sistem yang ada di suply base tidak memiliki alat deteksi termasuk flow in-take yang ada di Kilang," ujar Wahdiat.

Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) melihat adanya unsur kejanggalan pada peristiwa ini. Direktur CERI, Yusri Usman menjelaskan, sejak 30 Maret unit kontrol kilang Balikpapan sudah menunjukkan bahwa CDU IV hanya sirkulasi, artinya memang *feed* dari pipa bawah laut Lawe-Lawe ke Kilang Balikpapan sudah terputus, sehingga kondisi kilang Balikpapan hanya beroperasi 20 persen saja. Selain itu, di kompleks tangki Lawe-Lawe terdapat juga

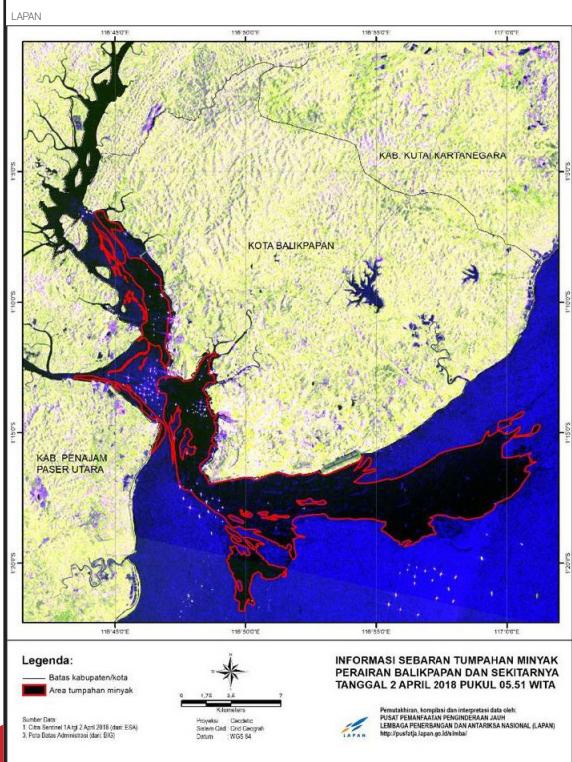
unit ruang kontrol untuk memonitor volume minyak mentah yang disupplai dan diterima di kilang.

"Kalau melihat dari alat kontrol sistem ini, seharusnya Pertamina sejak 31 Maret 2018 sudah menemukan sumber masalah terceceranya minyak di Teluk Balikpapan dari bocornya pipa bawah laut di Teluk Balikpapan, bukan baru hari senin sore, 2 April 2018 baru diketahui dan pada hari Selasa Pertamina melakukan sight sonar scan," papar Yusri.

Dia meminta Pertamina fokus pada penanggulangan dampak terhadap kerusakan lingkungan dan sosial serta tidak menuggu hasil investigasi pihak kepolisian mengenai penyebab patahnya pipa hingga bergeser 100 meter. Lagipula ujarnya, terlalu dini untuk meyimpulkan bahwa patahnya kilang akibat aktifitas ekternal dan mencurigai jangkar kapal Ever Judge sebagai penyebab. Tidak menutup kemungkinan kata Yusri, patahnya pipa akibat salah sistem sambungan dan kualitas pipa tidak memenuhi syarat, gerusan sedimen di sekitar pipa akibat arus

deras di sekitar teluk Balikpapan, atau bisa juga karena ada pencurian minyak





melalui pipa seperti yang pernah terjadi di Lawe-Lawe pada tahun 2005.

Lagi pula dia kurang sepakat dengan teori jangkar kapal Ever Judge menjadi penyebab patahnya pipa, pasalnya syahbandar pelabuhan sudah mempunyai peta jalur pipa di Teluk Balikpapan selalu memandu setiap kapal ketika akan merapat di sekitarnya, dan area laut di depan kilang Pertamina Balikpapan merupakan area terlarang bagi kapal-kapal yang akan lego jangkar kalau tidak atas persetujuan Pertamina dan Syahbandar dari Perhubungan Laut.

“Aneh dan lucunya lagi Menko Kemeritiman sudah mengeluarkan pernyataan pada tanggal 6 April 2018 bahwa

‘Pertamina tidak salah’. Tentu ini bisa jadi preseden buruk dibaca publik atas sikap saling klaim dari pejabat Pemerintah dari data yang tak jelas dan terbatas. Bisa jadi ini ancaman halus dialamatkan kepada tim investigasi untuk menyelidiki hipotesa mana yang mendekati kebenaran dan mendapat kesimpulan dari data-data hasil audit forensik yang harus dilakukan. Bahkan bisa jadi tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari Pertamina digugat oleh pemilik kapal yang telah dituduhkan tanpa bukti kuat itu,” ujar dia.

Yusri sendiri berpendapat sebaiknya Pertamina melakukan evaluasi internal agar jabatan strategis di korporasi diduduki oleh orang yang kompeten dan memiliki *sense of crisis*. Adapun dia melihat jejak rekam GM Pertamina Balikpapan sekarang, Togar MP merupakan sosok yang tidak tepat, karena sebelumnya pada saat Turn Around (overhaul/shutdown) Pertamina Balongan melampaui batas waktu yang wajar dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Lalu ketika Togar menjabat Manager Turn Around Pertamina Pusat, dia telah mengirimkan Pensiunan Pertamina untuk dipekerjakan di Pertamina Dumai tanpa memeriksa terlebih dahulu kesehatan di RSPP, akibatnya saat itu ada yang meninggal dunia. Selain itu dia juga menyesalkan lambatnya reaksi Direktur Pertamina terhadap bencana yang ada.

“Sampai dengan 7 hari setelah pencemaran berat yang menimbulkan korban nyawa manusia serta kebakaran hebat di laut, ternyata baik Direktur Pengolahan, Toharso maupun Deputy Direktur Operasi

Pengolahan, Budi Santosa Syarif tidak juga turun ke Balikpapan," sesalnya.

## Pertamina Siapkan Pengganti Pipa Bawah Laut yang Putus

Sementara menunggu pengangkatan pipa yang putus di Teluk Balikpapan akhir Maret (31/3) lalu, Pertamina menyiapkan pipa pengganti. Pipa yang putus tersebut masih berada di tempat semula untuk keperluan penyidikan.

"Pipa pengganti ini akan dibawa dari Balongan ke Balikpapan. Apabila pipa yang putus sudah diangkat dari dasar laut dan diperbolehkan oleh pihak penyidik untuk penggantian pipa, maka pipa pengganti ini dapat segera dipasang," jelas Yudy

Pipa yang disiapkan berjumlah sekitar 22 joint dengan panjang masing-masing 12 meter. Saat ini Pertamina mengalirkan minyak mentah dari Terminal Crude Lawe lawe ke kilang Balikpapan menggunakan pipa bawah laut lain yang berukuran 16 inchi. Dengan diangkatnya potongan pipa yang putus tersebut, Pihak Kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk menemukan penyebab putusnya pipa minyak mentah ini.

Kondisi pipa sebelum putus sangat baik dan diinspeksi secara berkala. Terakhir kali visual inspection tanggal 10 Desember 2017 oleh diver untuk check kondisi external pipa, cathodic protection dan spot thickness. Inspeksi untuk sertifikasi terakhir dilakukan 25 Oktober 2016, sertifikat kelayakan penggunaan peralatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas masih berlaku hingga 26



**Kapal Sea Heaven dipersiapkan untuk mengangkat pipa bawah laut Pertamina yang putus di perairan Balikpapan.**

Oktober 2019. Serifikasi dilakukan 3 tahun sekali sesuai SKPP Migas.

## Tumpahan Minyak (yang) Lain

Pada April 2010 terjadi kebocoran minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko. Peristiwa itu merupakan tumpahan minyak terbesar di lepas pantai dalam sejarah Amerika Serikat dan menjadi mala petaka bagi biota laut. Sumber minyak berasal dari dasar laut 10.000 feet (3.000 m) di bawah permukaan. Peristiwa yang diawali ledakan gas itu menyebabkan 11 orang pekerja meninggal di tempat.

Adapun tumpahan minyak di Balikpapan, untuk sementara diketahui berjumlah mencapai 40.000 barel dan Pertamina selaku industri migas yang bertanggungjawab atas insiden ini masih dalam tahap melakukan penyelesaian dari aspek hukum dan sosial.

*Ismed Eka-Dadangsah*